

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Herlina Novita^{1*}, Anita Yuli Sari Akbar Purba², Erika Sri Dwina Br Perangin-Angin³,
Engie Aurel Caroline⁴, Julius Kristofan Zai⁵

Universitas Prima, Medan Indonesia

dhabitaziggy@gmail.com^{1*} peranginangerika@gmail.com³

*Corresponding Author

Diajukan : 10 April 2022

Disetujui : 13 April 2022

Dipublikasi : 15 April 2022

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the impact of economic growth, regional original income, general allocation funds, and special allocation funds on the distribution of capital expenditure funds in the regencies and cities of North Sumatra, Indonesia. Purposive sampling was used to pick the samples for this study. Three hundred and ninety-nine samples were included in the study, all of which were from districts or cities in North Sumatra. Statistical analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing are the research approaches that were used in this thesis. Secondary data is the kind of information that was utilized. In this research, the findings demonstrate that economic growth, regional original income, general allocation funds, and special distribution funding all have a positive and statistically significant impact on capital expenditures. A partial influence of regional original income and special allocation funds on capital expenditures may be seen, but no effect is shown for economic growth and general allocation funds on capital expenditures.

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 dan 25 diundangkan, yang masing-masing mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di AS, setiap provinsi dan daerah memiliki kemampuan untuk mengatur keluarga mereka sendiri dengan sedikit campur tangan federal. Undang-undang tersebut direvisi dan disesuaikan sepanjang evolusinya dengan berlakunya Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun 2004, yang mengatur pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah federal dan daerah. Hal ini memperbesar kemungkinan bahwasannya pemerintah daerah (Pemda) akan mampu mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mempercepat kemajuan sosial. Pertumbuhan ekonomi akan mengilhami pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan ekonomi untuk mengelola sumber daya yang ada dan mempromosikan kemitraan masyarakat karena pekerjaan baru akan dihasilkan, yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan UU 23 tahun 2014. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari pemungutan pajak daerah, keuntungan retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Keseimbangan antara anggaran nasional dan daerah, yang diciptakan oleh UU No. 33 Tahun 2004, menempatkan fokus yang besar pada kewenangan pemerintah daerah. Transfer adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran. Mengalokasikan dana bagi hasil pajak pusat ke bagian daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan utama. Pemerintah daerah juga memiliki akses ke PAD, pinjaman daerah, dan sumber daya daerah lain yang memenuhi syarat, selain pendanaan negara bagian dan federal.

Pemerintah daerah menyumbangkan uang ke APBD untuk belanja modal guna meningkatkan nilai aset tetap. Besarnya uang yang dikeluarkan untuk belanja modal ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan publik. Belanja modal dimaksudkan untuk membeli peralatan, gedung, infrastruktur, dan aset tetap lainnya bagi pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah harus mengubah anggaran belanja layanan publik mereka untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan,

Seperti pada penelitian ini, yang dilakukan di Provinsi Labuhanbatu Selatan dan Serdang Bedagai di Indonesia. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, PDRB, PAD, dan DAU semuanya tumbuh pada 2018-2019, sedangkan belanja modal daerah turun Rp. 31.405.277. Penyusutan dan amortisasi (DAK) turun sebesar Rp. 53.754.406.000 pada tahun 2018-2019, meskipun belanja modal daerah meningkat sebesar Rp. 126.018.987.504. Belanja modal daerah harus tumbuh seiring dengan PDRB, PAD, DAU, dan DAK. Demikian pula sebaliknya. Peneliti ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap distribusi anggaran belanja modal. Mereka juga ingin mengetahui apakah dana alokasi umum dan khusus berdampak pada alokasi anggaran modal.

STUDI LITERATUR

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

“Belanja Daerah digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Daerah. Manajemen keuangan. Ini termasuk meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, layanan sosial dan fasilitas umum, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Pembangunan infrastruktur pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah untuk perbaikan sarana dan prasarana. Andrayani (Andrayani, 2013) mengklaim bahwasannya peningkatan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi daerah untuk membayar pengeluarannya, terutama belanja modal. Berbagai sumber pendapatan asli daerah tersedia, seperti hasil ajak dan retribusi daerah, serta akibat pengelolaan kekayaan daerah. Disebutkan dalam Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019) bahwasannya APBD dihasilkan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas daerah.

Nopitasari (Nopitasari et al., 2018) menemukan bahwasannya keterkaitan antara elemen pendapatan daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap variabel lain yang dievaluasi. Aditiya dan Dirgantari (Aditiya & Dirgantari, 2017) menemukan bahwasannya pendapatan daerah memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

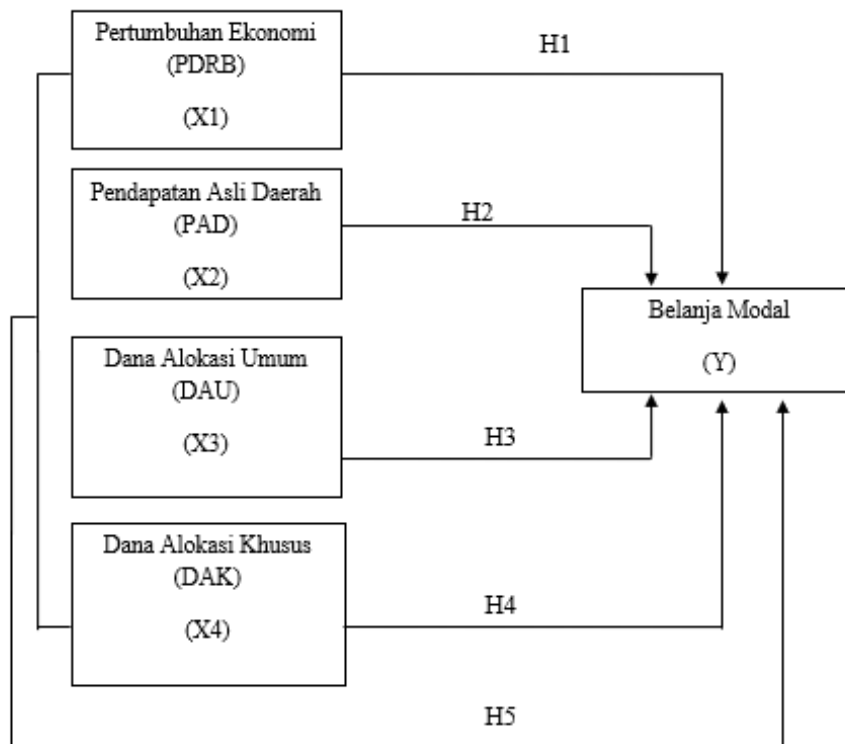
Belanja desentralisasi dibiayai oleh dana alokasi umum (DAU), yaitu dana APBN yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan. Karena desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (DAU). Dengan transfer DAU dari pemerintah pusat, daerah akan memiliki sumber

daya yang lebih besar untuk menggunakan PAD untuk mendukung inisiatif permodalan yang membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publik. Menurut analisis empiris Arwati dan Hidayati (Arwati & Hadiati, 2013), Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Teori Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Uang Alokasi Khusus adalah dukungan perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai inisiatif yang terkait dengan tantangan daerah dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah ruang yang dikeluarkan untuk program khusus oleh pemerintah daerah (Ardhini & Handayani, 2011). DAK digunakan untuk operasi investasi jangka panjang termasuk membangun, membeli, dan merenovasi infrastruktur fisik untuk layanan publik seperti instalasi pengolahan air. Penggunaan DAK untuk tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan belanja modal dan dengan demikian meningkatkan pelayanan publik. Yang lain merasa DAK adalah carayang baik untuk mendanai belanja modal (Pohan, 2018). Penelitian ini mempertunjukkan adanya hubungan antara ruang transfer pemerintah pusat (DAK) dengan anggaran belanja daerah yang disalurkan melalui belanja modal.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. kerangka penelitian

- H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
- H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
- H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
- H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- H5: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE

Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Laporan Realisasi APBD diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan melalui internet. Laporan Realisasi APBD di website APBD menyajikan informasi realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disediakan juga data Badan Pusat Statistik tentang PDB per kapita (BPS).

Populasi dan Sampel

Contoh laporan sampel adalah Laporan Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Ini adalah bagian dari atribut populasi. Penelitian ini menggunakan 39 sampel dari 33 populasi yang memenuhi kriteria (25 kabupaten dan 8 kota).

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan kota, dana alokasi umum dan khusus, dan belanja modal. Hubungan antara faktor-faktor ini direpresentasikan:

$$Y = \alpha + \beta_1PDRB + \beta_2PAD + \beta_3DAU + \beta_3DAK + e$$

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Untuk setiap variabel independen dan variabel dependen, uji-t digunakan untuk menentukan signifikansinya dalam kaitannya dengan variabel dependen.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menentukan relevansi faktor independen terhadap variabel dependen ketika variabel independen dianggap digabungkan.

Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dirancang untuk mengetahui derajat kedekatan atau hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasinya koefisien determinasi (adjusted R-square). Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk hasil pengolahan data regresi linear berganda dapat di lihat pada Tabel 1. berikut.

**Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

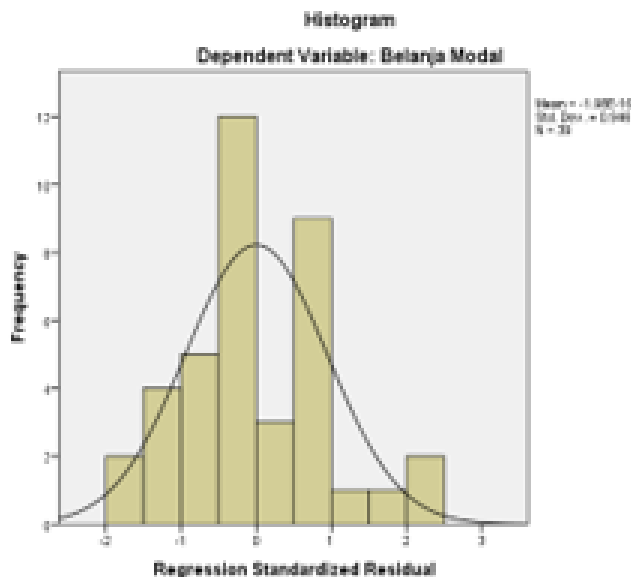
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
rPertumbuhan rekonomi	39	24332249	83283485	51761126,62	17486776,864
PAD	39	28169647917	233229176200	105776589858.44	48775268272.806
DAU	39	339271690000	923774467000	606478499871,79	135137578539,361
DAK	39	67755919000	323741379000	80703438140,97	60055566624226
Belanja Modal	39	78230946876	r379966122903	205135732272.64	74828105612903
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Diolah oleh SPSS versi 20

Uji Asumsi Klasik

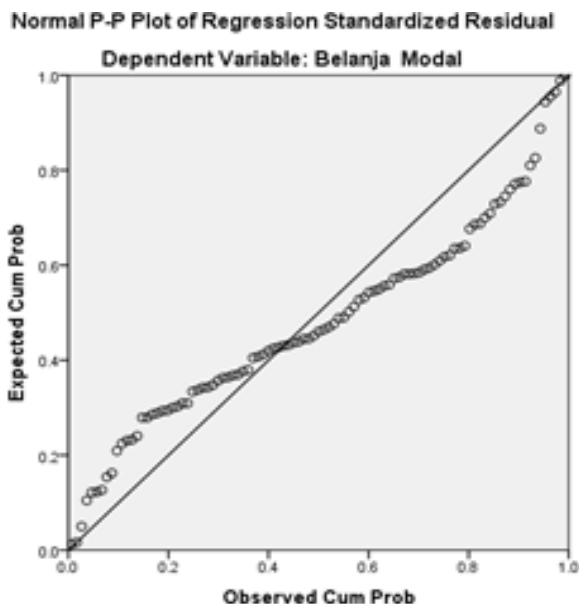
Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Baik grafik histogram dan plot probabilitas normal dapat digunakan untuk menguji normalitas.



Gambar 2. Grafik Histogram

Variabel memiliki distribusi normal dalam keadaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh histogram di atas. Normalitas didefinisikan sebagai grafik berbentuk lonceng yang tidak kiri atau kanan pusat.



Gambar 3. Uji Normalitas

Plot probabilitas normal menggambarkan bahwasannya titik-titik cenderung menyebar mendekati dan mengikuti garis diagonal, mempertunjukkan bahwasannya data berdistribusi normal. Dalam hal ini, plot probabilitas normal mempertunjukkan bahwasannya data terdistribusi secara teratur.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menentukan ada atau tidaknya variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi (independen). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 (Priyatno, 2013).

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

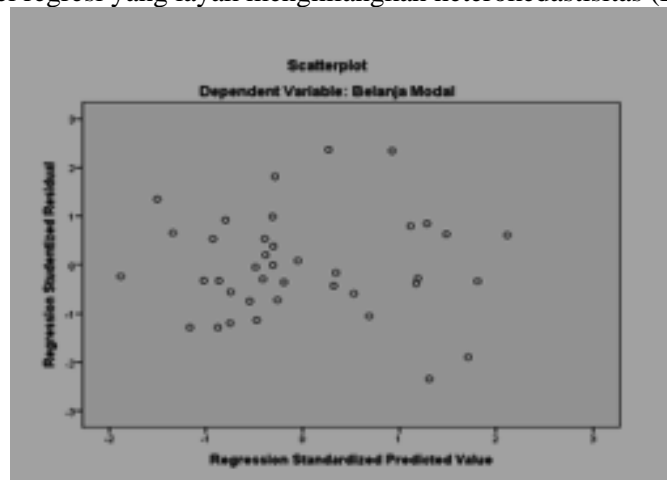
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pertumbuhan Ekonomi	.902	1.109
	Pendapatan Asli Daerah	.620	1.613
	Dana Alokasi Umum	.392	2.549
	Dana Alokasi Khusus	.533	1.875

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 2. mempertunjukkan bahwasannya semua nilai VIF kurang dari 10 dan semua nilai toleransi lebih besar dari 0. Uji statistik ini tidak menemukan multikolinearitas dalam kumpulan data.

Uji Heterokedastisitas

NKT digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel ada dalam pengamatan model lain. Menggunakan model regresi yang layak menghilangkan heterokedastisitas (Erlina, 2011).



Gambar 4. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4. Mempertunjukkan bahwasannya grafik scatterplot memiliki pola distribusi tak tentu atau pola teratur, dengan titik-titik tersebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Terbukti dengan temuan, data yang digunakan tidak mempertunjukkan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini menentukan ada tidaknya hubungan antara confounding error dalam satu periode dengan periode sebelumnya dalam model regresi menggunakan autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW) digunakan untuk menilai autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika $du > dw > 4 - du$. Untuk menguji autokorelasi diperoleh nilai 1,7215 $2,016 < 4 - 1,7215$ (Tabel 3.).

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.712 ^a	.507	.449	555242605.305	2.016
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat

Tabel 4. Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9425021077.412	4968865680.494	.237	-.190	.896
	Pertumbuhan Ekonomi	1012.090	542.351	.237	1.866	.071
	Pendapatan Asli Daerah	.080	.235	.443	2.808	.007
	Dana Alokasi Umum	-.689	.106	-.122	-.636	.529
	Dana Alokasi Khusus	.727	.205	.583	3.539	.001
a. Dependent Variable: Belanja Modal						

Berdasarkan Tabel 4. di atas maka persamaan regresinya:

$$Y = a + \beta_1PE + \beta_2PAD + \beta_3DAU + \beta_4DAK + e$$

$$Y = -9425021077.412 + 1012.090PDRB + 0.680PAD - 0.068DAU + 0.727DAK$$

Dari persamaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

1. Diketahui nilai konstanta (a) sebesar -9425021077.412 jika PDRB, PAD, DAU, dan DAK bernilai 0, maka Belanja Modal nilainya sebesar -9425021077.412.
2. Nilai koefisien regresi dari Pertumbuhan Ekonomi adalah 1012.090, dapat diartikan bahwasannya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja modal meningkat sebesar 1012.090.
3. Nilai koefisien regresi dari PAD adalah 0.680, dapat diartikan bahwasannya ketika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rsatuan, maka belanja modal meningkat sebesar 0.680.
4. Nilai koefisien regresi DAU adalah -0.068, dapat diartikan bahwasannya ketika DAU mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja modal menurun sebesar -0.068.
5. Nilai koefisien regresi DAK adalah 0.727, dapat diartikan bahwasannya ketika DAK mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka belanja modal meningkat sebesar 0.727.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi uji t dinilai dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan t hitungnya melebihi t tabel.

Tabel 5. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9425021077.412	49688765660.494		-.190	.851
	Pertumbuhan Ekonomi	1012.090	542.351	.237	1.866	.071
	Pendapatan Asli Daerah	.680	.235	.443	2.898	.007
	Dana Alokasi Umum	-.068	.106	-.122	-.636	.529
	Dana Alokasi Khusus	.727	.205	.583	3.539	.001

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas dengan asumsi bahwasannya ekspansi ekonomi tidak berpengaruh besar terhadap belanja modal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan sig kurang dari 0,05 (0,007 kurang dari 0,05) dan t hitung lebih besar dari tabel (2,898 lebih besar dari 1,685).
2. Karena DAU memiliki nilai sig lebih dari 0,05 (0,529) dan t hitung lebih besar dari t tabel (-0,636), maka kesimpulannya DAU tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap belanja modal karena nilai signya lebih kecil dari 0,05 (0,001).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk menilai pengaruh gabungan dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107951236605300040000000.000	4	26987809151325010000000.000	8.754	.000 ^b
	Residual	10482008822003360000000.000	44	3092943771177449000000.000		
	Total	212771324825333300000000.000	38			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Tabel 6. dapat disimpulkan bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi mengukur kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel independen atau prediktor. R2 memiliki rentang 0 hingga 1.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.507	.449	55524262905.305
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum				
b. Dependent Variable: Belanja Modal				

Dengan penyesuaian R square sebesar 0,4449 atau 44,9%, komponen belanja modal dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum sedangkan faktor lain dapat menjelaskan 55,1%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil uji-t mempertunjukkan bahwasannya tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Terjadi peningkatan nilai sig pertumbuhan ekonomi (0,071) dan t hitung (t tabel) (1,866 lebih besar dari 1,685). Hasil penelitian ini membantah hipotesis pertama..

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji t mempertunjukkan bahwasannya pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja modal. t hitung lebih besar dari tabel PAD memiliki nilai sig kurang dari 0,05 (0,007) (2,898 lebih besar dari 1,685). Setelah penelitian ini, hipotesis kedua benar.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil uji t mempertunjukkan bahwasannya tidak ada hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal. DAU memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05 (0,529) dan t hitung lebih besar dari t tabel (-0,636) mempertunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga tidak benar. Hasil ini sejalan dengan Mia Rachmawati (Rachmawati, 2016) dengan hasil dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil uji t mempertunjukkan bahwasannya dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Berasal dari analisis sig DAK (0,001 0,05), (3,539 lebih besar dari 1.685). Hipotesis keempat diterima berdasarkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak sepaham dengan Muhammad Syukri (Syukri, 2019) dengan hasil yang menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sepaham dengan Arbie Gugus Wandira (Wandira, 2013) dengan hasil secara signifikan terdapat pengaruh variabel DAK terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Uji F mempertunjukkan bahwasannya $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,754 > 2,65) dengan sig. 0,05 (0,000<0,05) lebih besar dari Ftabel, mempertunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK semuanya berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hipotesis kelima diterima berdasarkan hasil penelitian ini.

KESIMPULAN

Pertumbuhan Ekonomi Tidak ada dampak dan tidak signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dampaknya positif dan substantial terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Umum (DAU) Tidak ada dampak dan tidak

signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dampaknya positif dan substansial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan Dampaknya positif dan substansial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada yang terhormat Ibu Herlina Novita, S.E, M.Si, sebagai dosen pembimbing atas kesudiannya memberikan bantuan dan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini ditengah-tengah kesibukannya.

REFERENSI

- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Kompartemen*, 15(1).
- Andrayani, N. P. D. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Tangibility Assets terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Udayana.
- Ardhini, & Handayani, S. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro.
- Arwati, D., & Hadiati, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Terapan 2013*.
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian : Untuk Akuntansi*. USU Press.
- Nopitasari, H., Tiorida, E., & Sarah, I. S. (2018). Pengaruh Financial Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 3(3), 45–56. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v3i3.944>
- Pohan, C. A. (2018). *Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Gava Media.
- Rachmawati, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat). *Akuntansi*, 1–11.
- Syukri, M. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Andi Djemma.

Wandira, A. G. W. (2013). pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.